

POLA ADAPTASI SOSIAL PEREMPUAN KORBAN PENGUSURAN DI DKI JAKARTA, MEDAN, DAN MAKASSAR

Ikhlasiah Dalimoenthe, Evy Clara, Yenina Akmal

Universitas Negeri Jakarta

Email: ika-dalimoenthe@unj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola adaptasi sosial pada keluarga korban pengusuran di perkotaan, khususnya di DKI Jakarta, Medan, dan Makassar. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan paradigma *post-positivistik-mixed method*. Lokasi penelitian di DKI Jakarta, Medan, dan Makassar dengan waktu penelitian selama 6 bulan, yaitu Mei – Oktober 2020. Subyek penelitian ialah Keluarga korban pengusuran DAS Ciliwung dan Penjarangan (DKI Jakarta); sungai Deli, Medan; dan di jalan A. P. Pettarani 2, jalan Rajawali serta Bara-Baraya, Kota Makassar. Ada empat pola adaptasi sosial yang dilakukan oleh para korban pengusuran yang di relokasi, yaitu adaptasi fisik, sosial, ekonomi, dan teritori. Adaptasi masyarakat pada aspek lingkungan fisik menunjukkan masih dalam tahap penyesuaian diri dari lokasi lama ke lokasi baru. Adaptasi lingkungan sosial tampaknya belum sepenuhnya diterima. Adaptasi Ekonomi yang dilakukan adalah penyesuaian terhadap anggaran rumah tangga, karena pengeluaran menjadi lebih besar. Sementara itu, mengenai adaptasi teritori ada, ada tiga klasifikasi kategori teritori, yaitu: (1) ruang privat); (2) ruang yang bersifat semi-privat; dan (3) ruang publik.

Kata kunci: *pola, adaptasi sosial, keluarga korban pengusuran, perkotaan*

Pendahuluan

Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah, akademisi dan bahkan seluruh komponen masyarakat. Selain itu, kemiskinan bukan hanya terjadi pada wilayah-wilayah pedesaan. Namun, kemiskinan juga dapat berkembang di daerah-daerah perkotaan termasuk Ibukota Jakarta, Kota Medan dan Makassar. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan adalah dengan pembuatan kebijakan, pengawasan, penelitian, dan evaluasi. Pada tahun 2018, angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 9,82 persen atau menyisakan sekitar 25,95 juta penduduk miskin dan tersebar di kota-kota besar.

Kemiskinan yang terjadi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Medan dan Makassar, tidak bisa dilepaskan dari paradigma masyarakat pedesaan yang menganggap bahwa Ibukota Jakarta sebagai kota impian untuk hidup sejahtera. Hal inilah yang membuat urbanisasi terjadi secara masif. Di sisi lain, fenomena ini juga mengindikasikan adanya ketimpangan dalam hal pembangunan fisik di sektor ekonomi antara desa dan kawasan perkotaan (Schumacher, 1999; Malik, et al. 2015). Over urbanisasi ini berdampak pada: (1) Terjadinya ledakan jumlah penduduk; (2) meningkatnya tindak kejahatan; (3) menurunnya kualitas kesehatan; (4) berkembangnya sektor ekonomi informal, termasuk eksploitasi anak di bawah

umur; (5) menyempitnya lahan permukiman serta hilangnya lahan hijau; dan (6) rawan bencana (Jalil dan Iqbal, 2010; Dociu dan Dunarintu, 2012; Uttara, et al. 2012; Cui dan Shi, 2012; Tah dan Ghosh, 2015; Bapari, et al. 2016).

Dari beberapa dampak yang disebutkan, penyempitan lahan untuk permukiman adalah hal yang dapat dirasakan secara langsung. Realitas inilah yang kemudian mendorong terbentuknya *slum area* dan lokasi yang sering dijadikan pilihan seperti daerah aliran sungai (DAS), kolong-kolong jembatan, serta beberapa wilayah pinggiran kota, yang dekat dengan pusat-pusat perdagangan (Crooks, et al. 2016). Pada konteks berkembangnya *slum area* di DKI Jakarta sudah terjadi pada tahun 1960-an (Ali dan Fodmer, 1969). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tumbuh suburnya *slum area* berbanding lurus dengan pembangunan perkotaan.

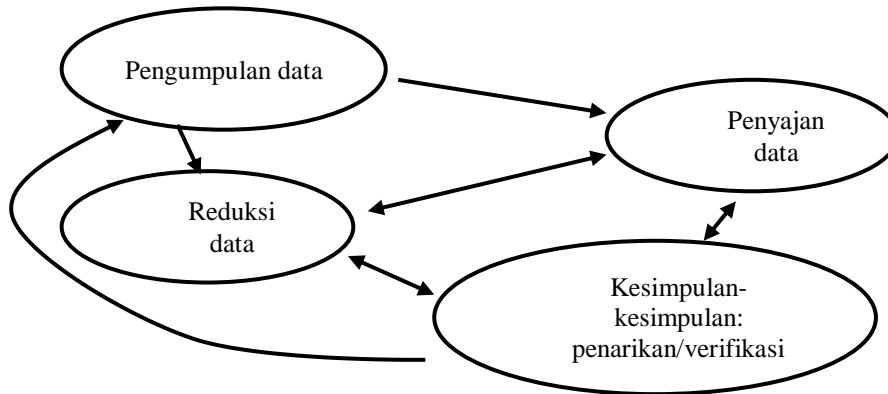
Keberadaan *slum area* pada akhirnya menjadi suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Alasannya, selain membuat penataan kota tidak teratur, *slum area* juga merupakan salah satu tempat tumbuh suburnya penyakit bagi masyarakat dan juga bagi ekosistem lingkungan hijau (Bagheri, 2012; Suradi, 2015; Prasad dan Gupta, 2016). Oleh sebab itu, tindakan yang biasa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penggusuran dan relokasi. Berkaitan dengan ini, kelompok masyarakat yang paling dirugikan adalah dari kaum Ibu dan Anak (Wahyuni, 2006). Para korban penggusuran ini akan merasakan taruma kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, dan mengalami destitusi (UN-Habitat, 2014; Tilahun, et al, 2017; Samuel, et al 2017; Kebede et al 2020).

Berangkat dari konteks inilah peneliti berupaya mengkaji mengenai pola adaptasi sosial perempuan korban penggusuran di DKI Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan paradigma post positivis, *mixed method* (Cresswell, 2010; Newman, 2013). Lokasi penelitian dilakukan di DKI Jakarta, Medan, dan Makassar. Penelitian di DKI Jakarta, Surabaya, dan Makassar selama 6 bulan, yaitu Mei – Oktober 2020. Subyek penelitian ialah Keluarga korban penggusuran DAS Ciliwung dan Penjaringan (DKI Jakarta); sungai Deli, Medan; dan di jalan A. P. Pettarani 2, jalan Rajawali serta Bara-Baraya, Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) studi pustaka; (2) menyebar kuesioner secara daring/*online*; dan (3) *FGD/Workshop* secara daring/*online*. Studi pustaka digunakan dalam rangka menghimpun studi-studi sejenis dan konseptualisasi tentang penggusuran di perkotaan. Terkait dengan survei, penentuan/pemilihan responden dilakukan secara *purposive sampling*, sedangkan penentuan jumlah responden ditentukan secara proporsional dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk dewasa. FGD secara online difokuskan kepada para korban penggusuran untuk memperoleh lebih dalam data penelitian.

Sementara itu, analisis data bertumpu pada analisis data kuantitatif deskriptif dan analisis kualitatif model interaktif (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan) dari Miles dan Huberman (1992).



Gambar 1. Analisis model interaktif

(Sumber: Miles dan Huberman. 1992).

Temuan dan Pembahasan

1. Kondisi Keluarga Korban Penggusuran: Pra dan Pasca Penggusuran

Temuan lapangan mengungkap fakta bahwa pra-penggusuran sebagian besar responden, merupakan warga asli DKI Jakarta, sebesar 66% dan dan pendatang 34%. Mayoritas korban penggusuran telah tinggal di lokasi asal penggusuran antara 20-30 tahun (88%) dan 10 tahun ke atas (12%). Di lokasi sebelumnya, 83% responden tinggal di rumah milik sendiri, 10% menumpang di rumah orang tua dan 7% lainnya menyewa. Pasca relokasi ke Rusunawa Jatinegara dan Marunda, semua responden merupakan penyewa dengan jangka waktu tertentu. Perubahan status ini, menjadikan responden hidup tanpa tanah (*landless*) dan bangunan, rentan terhadap pengusiran, dan bertambahnya beban biaya kebutuhan hidup harian (seperti: sewa rusun, air, listrik dan makanan).

Bertambahnya biaya kebutuhan hidup dan hilangnya sumber penghidupan menjadikan keluarga korban penggusuran semakin rentan, berkurang kemandirian, dan lebih bergantung pada bantuan pemerintah dan NGO. Hal ini mengindikasikan bahwa penggusuran berdampak pada perubahan kondisi ekonomi (94,4%) dan mengubah orientasi hidup keluarga korban. Ada 3 penanda yang mendorong perubahan orientasi hidup, yaitu: kehilangan memori tempat tinggal, kampung halaman, dan hilangnya sistem kekerabatan yang sudah terbangun sejak lama. Di lokasi baru (rusunawa), soliditas masyarakat masih tergolong lemah (42%), dibandingkan di lokasi sebelumnya (58%). Dengan demikian, penggusuran telah mengubah masyarakat yang mandiri dan solid menjadi masyarakat yang tergantung.

Berbeda dengan kota Medan dan Makassar, pasca penggusuran pemerintah tidak memberikan relokasi kepada para korban penggusuran. Adapun ganti rugi yang diterima masyarakat kota Medan hanya sekitar Rp 1.500.000,- perkepala keluarga. Mayoritas warga

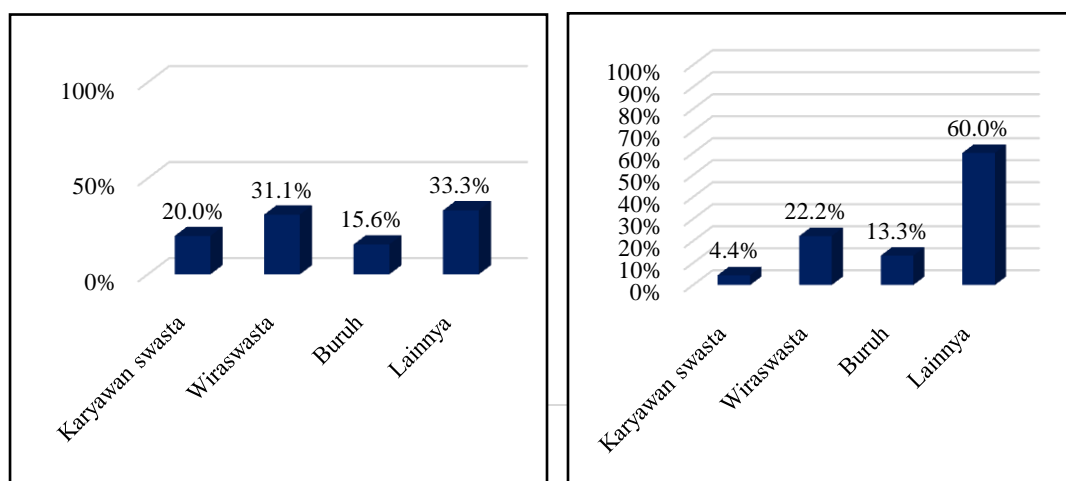
menolak adanya penggusuran, meski di dalam proses penggusuran, warga menjawab sekitar 67.4% menyatakan pemerintah tidak melakukan tindakan represif saat penggusuran dan 17.4% melakukan tindakan represif. Di sisi lain, penggusuran juga secara nyata membawa dampak terhadap perekonomian masyarakat. akibat penggusuran tersebut, banyak masyarakat yang kehilangan mata pekerjaannya.

Berdasarkan temuan di lapangan, mayoritas korban penggusuran bekerja sebagai pedagang dan wiraswasta dengan sama-sama memiliki persentase 19,6%. Maka dari itu, penggusuran yang dilakukan pemerintah secara langsung melemahkan pula perekonomian masyarakat. Sebab, lapak dagang dan usaha yang dimiliki oleh warga juga turut menjadi objek penggusuran. Selain itu, dampak ekonomi juga dirasakan oleh korban penggusuran yang bekerja sebagai karyawan. Di mana, jumlah korban penggusuran yang bekerja sebagai karyawan mencapai 13%. Secara praktik, adanya penggusuran dan relokasi membuat mereka harus mengeluarkan biaya ongkos tambahan untuk bisa sampai ke tempat kerja. Sementara itu, status pekerjaan nonproduktif yang berjumlah 39% juga harus ditanggung oleh pekerja produktif. Adapun mengenai rentang waktu penggusuran, dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Menurut pengakuan korban penggusuran baik di Kota Medan maupun Makassar, eksekusi lahan paling banyak dilakukan hanya dalam satu hari sampai dua bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penggusuran tersebut tidak direncanakan dengan baik. Sehingga di dalam prosesnya, cenderung mendapat penolakan dan aksi protes dari masyarakat. Maka, tidak terlalu mengherankan jika banyak warga yang merasa syok dan stres dalam menghadapi realitas tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil temuan yang menyatakan bahwa terdapat 19,6% reponden mengalami stres dan membutuhkan waktu sekitar 1 minggu sampai 6 bulan untuk bisa kembali beraktivitas.

Para korban merasa bahwa tempat relokasi yang diberikan pemerintah relatif kurang baik. Di mana 54,3% masyarakat menilai bahwa layanan yang diberikan pemerintah kurang baik. Kekurangan ini berkaitan dengan fasilitas akses jalan raya, MCK, dan hunian yang relatif sempit. Perubahan struktur nafkah yang dialami oleh keluarga korban penggusuran begitu sangat terlihat. Untuk dapat membandingkannya, dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Mata Pencaharian Sebelum dan Sesudah di Gusur



Mata Pencapaian Masyarakat Sebelum
Digusur

Mata Pencapaian Masyarakat
Setelah Digusur

Sektor pekerjaan yang paling berdampak akibat penggusuran adalah pekerjaan sebagai karyawan swasta. Masyarakat lebih memilih untuk berhenti bekerja karena gaji sebagai karyawan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga. Gaji yang mereka dapat habis untuk biaya transportasi apabila terus bekerja di tempat yang lama. Hal ini merupakan akibat dari semakin jauhnya jarak tempat tinggal baru dengan lokasi kerja. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang akhirnya memilih pekerjaan lain seperti menjadi kuli serabutan atau dalam mencari pekerjaan yang baru. Merujuk pada serangkaian temuan yang telah dilakukan, penggusuran secara signifikan berdampak buruk bagi para korban penggusuran. Selain pada aspek ekonomi yang telah dijelaskan diatas, terdapat juga dampak psikis dan sosial masyarakat pasca penggusuran. Permasalahan ini ditengarai oleh kurangnya persiapan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan proses penggusuran dan kurang matangnya solusi yang ditawarkan pasca penggusuran.

Sekitar 32.6% reponden mengalami perasaan traumatik pasca penggusuran, 8.7% mengalami kasus pertengkaran/perceraian, dan 19.6% responden mengalami depresi akibat penggusuran tersebut. Hal tersebut bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan penggusuran. Kasus traumatik, pertengkaran, perceraian, dan depresi yang didapatkan korban penggusuran setidaknya membutuhkan waktu 1-2 minggu bahkan ada yang membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk pemulihan awal.

Salah satu hal positif yang ditemukan adalah tingkat solidaritas masyarakatnya sangatlah tinggi ditempat relokasi yang mereka tempati saat ini. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan skoring dari angka 1-10. Mayoritas mereka menjawab pada angka 10 dan angka 7, kemudian hanya sedikit responden yang menjawab pada angka 1. Hal ini menandakan perjuangan mereka bukan hanya pada tahapan individu seperti tetap mencari penghidupan keluarga dengan kondisi yang buruk, tetapi pada tahapan kelompok juga yang mana mereka saling membantu satu sama lainnya.

2. Adaptasi Sosial Korban Penggusuran di DKI Jakarta, Medan dan Makassar

Ada empat pola adaptasi sosial yang dilakukan oleh para korban penggusuran yang terjadi di DKI Jakarta, Medan dan Makassar yaitu adaptasi fisik, sosial, ekonomi, dan teritori. Adaptasi masyarakat Rusunawa Jatinegara Barat dan Marunda pada aspek lingkungan fisik menunjukkan masih dalam tahap penyesuaian dari hunian horizontal ke hunian vertikal. Mereka harus beradaptasi juga dari ukuran rumah yang semula besar menjadi kecil dengan ukuran tipe 30 yang di dalamnya berisi ruang tamu sekaligus dijadikan sebagai ruang keluarga, dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur yang berdekatan dengan ruang tamu. Kondisi fisik yang kecil ini, juga ada yang ditempati oleh lebih satu keluarga. Hal ini sangat diluar kelayakan sebuah tempat tinggal. Selain itu, lapak usaha bagi para pedagang pun

cenderung sepi dan tidak dilengkapi dengan fasilitas lain seperti MCK dan kamar untuk beristirahat.

Adaptasi lingkungan sosial tampaknya belum sepenuhnya diterima. Proses sosialisasi masih terus berlangsung walaupun lambat, karena banyak warga yang lebih senang didalam rumah dikarenakan belum mengenal lebih dekat dengan tetangga yang baru. Adaptasi penghuni dengan ruang publik pun belum optimal. Adaptasi ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan penghuni di ruang publik, seperti interaksi dan sejenisnya. Masyarakat yang tinggal di pemukiman pada umumnya berinteraksi dengan tetangga di jalan atau gang rumah mereka. Sementara itu, di tempat baru mereka harus berinteraksi di koridor-koridor baru, seperti di rusunawa untuk Korban di DKI Jakarta. Di sini terjadi perubahan pola interaksi yang pada gilirannya mengubah pola adaptasi sosial para penghuni rusunawa.

Adaptasi Ekonomi yang dilakukan adalah penyesuaian terhadap anggaran rumah tangga, karena pengeluaran menjadi lebih besar. Penambahan pengeluaran itu, umumnya terkait dengan perubahan lokasi kerja/usaha, lokasi pendidikan anak, dan aksesibilitas lainnya. Sebelum pengurusan fungsi *supporting* kaum perempuan dalam mendampingi anak ke sekolah dekat jaraknya. Namun, pasca pengurusan menjadi lebih jauh.

“Saat anak-anak saya tidak lagi sekolah, karena saya tidak lagi dapat mengantarkan mereka.... Jaraknya jauh, ongkosnya mahal. Belum lagi, saya harus membantu ekonomi keluarga dengan mencari kerjaan tambahan.

Dari uraian di atas diketahui bahwa pengurusan berimplikasi terhadap bertambahnya beban dan peran perempuan dalam rumah tangga. Konsekuensi dari keduanya mengharuskan perempuan lebih berdaya dan kuat (*strong*). Hal ini dapat didorong model dan program pemberdayaan pada keluarga korban pengurusan.

Adaptasi teritori yang dibentuk melalui hubungan antara sesama penghuni relokasi maupun dengan orang yang berasal luar lokasi. Setelah berhasil beradaptasi, penghuni kemudian membentuk teritori sebagai bentuk penanda penguasaan suatu area, dalam hal korban yang direlokasi ke lingkungan rusunawa, ada tiga klasifikasi kategori teritori, yaitu: (1) ruang privat; (2) ruang yang bersifat semi-privat; dan (3) ruang publik.

Ruang privat merupakan ruang yang sifatnya sangat pribadi, hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang sudah sangat akrab atau yang sudah mendapatkan izin khusus. Kegiatan yang berlangsung di dalam teritori ini merupakan aktivitas domestik keluarga, seperti makan, tidur, bercengkrama, mencuci, memasak, mandi, dan sebagainya. Luasan teritori ini adalah seluas ruangan satuan rumah susun masing-masing unit hunian, dimana ditandai dengan pembatas *material fixed* berupa dinding tembok.

Ruang yang bersifat semi-privat-semi publik ditempati bersama oleh sejumlah orang yang sudah cukup saling mengenal, lebih longgar pemakaiannya dan pengontrolan oleh perorangan. Berdasarkan hasil observasi, yang termasuk ruang semi privat pada rusun ini adalah selasar rusunawa. Personalisasi selasar rusunawa sebagai ruang semi privat ini biasanya ditandai dengan pemberian kursi atau balai-balai di depan masing-masing. Ruang ini walau ditempati bersama namun cenderung dimiliki dan dipersonalisasi oleh

penghuni yang bersangkutan. Jenis kegiatan yang biasanya berlangsung pada teritori ini adalah aktivitas bersosialisasi antar tetangga berdekatan unit hunian. Selain itu, aktivitas yang dilakukan dalam teritori ini adalah menerima tamu yang ingin bercakap-cakap dengan penghuni rumah susun.

Sementara itu, ruang semi publik adalah koridor, tangga serta ruang kosong di depannya yang masih bagian dari selasar, halaman rusunawa termasuk tempat parkir. Ruang ini dikategorikan sebagai ruang semi publik karena walaupun ruang ini ditempati bersama namun cenderung tidak diakui kepemilikannya oleh masing-masing individu. Walaupun begitu, pengontrolan pada ruang semi publik ini tetap dilakukan, terutama bila ada orang asing yang masuk ke dalam area ini. Jenis kegiatan yang biasanya berlangsung pada teritori ini adalah menongkrong dan bersosialisasi antar tetangga baik dari blok yang sama maupun antar penghuni rumah susun secara keseluruhan. Personalisasi teritori ini biasanya ditandai dengan elemen *semifixed* maupun *non-fixed*.

Ruang publik (*public sphere*) antara lain gedung serbaguna, yang meliputi, taman baca, masjid, dan kantin. Ruang ini dikategorikan sebagai ruang publik, karena pemanfaatannya yang terbuka bagi siapa saja, baik penghuni rusunawa maupun masyarakat dari luar rusunawa. Jenis aktivitas pada teritori ini seperti penyuluhan, rapat, arisan maupun acara keagamaan, dan lainnya. Pembatas ruang ini adalah *elemen fixed*, karena ruang ini sudah merupakan kelengkapan benda bersama dari rusunawa.

Penutup

Ada empat pola adaptasi sosial yang dilakukan oleh para korban penggusuran yang terjadi di DKI Jakarta, Medan dan Makassar, yaitu adaptasi fisik, sosial, ekonomi, dan teritori. Adaptasi masyarakat pada aspek lingkungan fisik menunjukkan masih dalam tahap penyesuaian dari hunian horizontal ke hunian vertikal. Adaptasi lingkungan sosial tampaknya belum sepenuhnya diterima. Proses sosialisasi masih terus berlangsung walaupun lambat, karena banyak warga yang lebih senang di dalam rumah, dikarenakan belum mengenal lebih dekat dengan tetangga yang baru.

Adaptasi Ekonomi yang dilakukan adalah penyesuaian terhadap anggaran rumah tangga, karena pengeluaran menjadi lebih besar. Penambahan pengeluaran itu, umumnya terkait dengan perubahan lokasi kerja/usaha, lokasi pendidikan anak, dan aksesibilitas lainnya. Sebelum penggusuran fungsi *supporting* kaum perempuan dalam mendampingi anak ke sekolah dekat jaraknya. Namun, pasca penggusuran menjadi lebih jauh. Adaptasi teritori merupakan bentuk penanda penguasaan suatu area, dalam hal ini yaitu lingkungan rusunawa. Ada tiga klasifikasi kategori teritori, yaitu: (1) ruang privat(2) ruang yang bersifat semi-privat; dan (3) ruang publik.

Daftar Pustaka

Ali, R. M. and F. Bodmer. 1969. *Djakarta Djaja Sepanjang Masa*. Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta

- Bagheri, M. 2012. The Challenge of Slums: Socio-Economic Disparities. *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 2(5), pp. 410-414.
- Bapari, Md. Y., et al. 2016. Impacts of Unplanned Urbanization on the Socio-Economic Conditions and Environment of Pabna Municipality, Bangladesh. *Journal of Enviroment and Earth Science*, Vol. 6(9), pp. 105-114.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018*. Diakses pada 28 Januari 2019, tersedia di: <https://www.bps.go.id>.
- [BPS DKI Jakarta] Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2018. *Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Maret 2018 Provinsi DKI Jakarta*. Diakses pada 28 Januari 2019, tersedia di: <https://jakarta.bps.go.id>.
- Crooks, A., et al. 2016. The Study of Slums as Social and Physical Constructs: Challenges and Emerging Research Opportunities. *Journal Regional Studies, Regional Science*, Vol. 3(1), pp. 737-757.
- Cresswell, John. 2010. *Research design – qualitative and quantitative approaches*. New Delhi.
- Cui, L and Shi, J. 2012. Urbanization and its environmental effects in Shanghasi, China. *Journal Urban Climate*, Vol. 2, pp. 1-15. Diunduh pada 25 Januari 2019, tersedia di: <http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2012.10.008>.
- Dociu, M and Dunarintu, A. 2012. The Socio-Economic Impact of Urbanization. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, Vol. 2(1), pp. 47-52.
- Jalil, H. H and Iqbal, M. M. 2010. Urbanization and Crime: A Case Study of Pakisan. *Journal The Pakistan Development Review*, Vol. 49(4), Part II, pp. 741-755.
- Kebede, B., Abay, M., Gunse, T. 2020. Major Causes of Organs and Carcass Condemnation and Financial Losses in Cattle Slaughtered at Adama Municipal Abattoir, Adama, Ethiopia. *International Journal of Economic Behavior and Organization*, Vol. 8(2), pp. 31-37.
- Malik, N., et al. 2015. Major Factors Leading Rapid Urbanization in China and Pakistan: A Comparative Study. *Journal of Social Science Studies*, Vol. 5(1), pp. 148-168.
- Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social research methode: qualitative and quantitative approach*. Needham Heights. MA: Allyn & Bacon.
- Prasad, R., & Gupta, N. 2016. Problems and Prospects of Slums in India. *International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies*. Vol. 3(3), pp. 67-78.
- Samuel, W., Argaw, S., Mandado, T. 2017. A Study on the Major Causes of Organ and Carcass Condemination in Cattle Slaughtered at Wolaita Sodo Municipality Abattoir. *Food Science and Quality Management*. Vol. 60, pp.1-9.
- Schumacher, E.F. 1999. *Small is Beautiful: Economics As If People Mattered 25 Years Later....With Commentaries*. Hartley & Marks Publishers.
- Suradi. 2015. Model Identifikasi Permasalahan Sosial di Kawasan Kumuh Perkotaan. *Sosio Informa*, Vol. 1(2), pp. 106-120.

- Tah, S and Ghosh, B. 2015. The Impact of Urbanization on Environment: A Study in Durgapur City. *Journal Research Proccess*, Volume 3 Number 3: 112-123.
- [UN] United Nation. 2014. *Forced Evictions, Fact Sheet No. 25/Rev. 1*. New York: UN HABITAT and UN HUMAN RIGHTS.
- Tilahun, S., Fekadu, A., Mekibib, B. 2017. Major Causes of Total Organ Condemnation and their Direct Financial Impact in Cattle Slaughtered at Hawassa Municipalty Abattoir, Southern Ethiopia. *Journal of Veterinary Science & Technology*. Vol. 8(5), 1-5.
- Uttara, S., et al. 2012. Impact of Urbanizationon Environment. *Journal IJREAS*, Vol. 2(2), pp. 1637-1645.
- Wahyuni, Dewi Nova. 2006. *Penggusuran Paksa dan Dampaknya terhadap Perempuan: Catatan dari Lapangan*. Komnas Perempuan, Nov. 2006, Sebagai lampiran “Kajian oleh Pelapor Khusus Mengenai Perumahan yang layak: Perempuan dan Perumahan yang Layak” dalam Seri Dokumen Kunci 7.